

Judul : Hukum berat polisi perusak citra polisi
Tanggal : Senin, 25 November 2024
Surat Kabar : Pikiran Rakyat
Halaman : 9

Hukum Berat Polisi Perusak Citra Polri

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak memberi ruang terhadap oknum anggota polisi yang merusak citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Jangan sampai ada lagi kasus polisi tembak polisi seperti yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatra Barat. Apalagi polisi yang menegakkan hukum menjadi korban, sedangkan oknum polisi yang menembak diduga melindungi pelaku kejahatan.

"Bisa jadi ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Ada polisi baik yang mau menegakkan hukum tapi ada juga oknum polisi yang mau membekingi kejahatan," kata Rudianto seperti dilansir Antara, Minggu (24/11/2024).

Citra Polri sebagai pelindung dan pengawal masyarakat jangan sampai dirusak polisi nakal. Terlebih lagi, dia pun menyayangkan karena kasus itu diduga dilatarbelakangi dengan kasus kejahatan sumber daya alam.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah berkalkali menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu cara menyejahterakan rakyat. Sehingga, dia menegaskan bahwa anggota polisi yang berupaya menumpas kejahatan di bidang SDA harus dikawal dan dilindungi institusi Korps Bhayangkara. Pasalnya, Presiden pun sudah menugaskan Polri untuk hal itu.

"Bayangkan saja, ini seperti kisah-kisah film, kisahnya ternyata nyata di Indonesia. Ada polisi ditembak polisi di kantor polisi," kata dia.



PFTUGAS provos mengawal tersangka AKP Dadang Iskandar saat konferensi pers di

Mapolda Sumatra Barat, Padang, Sabtu (23/11/2024). Dadang menjadi tersangka penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari hingga tewas.

Senin (25/11/2024), dia mengaku akan ikut bersama anggota Komisi III DPR RI lain berkunjung ke Sumatra Barat untuk mengecek kasus tersebut, serta menggali dugaan kejahatan sumber daya alam yang melatarbelakangi adanya kasus tersebut.

"Saya sendiri akan mengecek siapa dalang yang membekingi, apa motifya, tapi kita enggak mau mendahului pemeriksaan," kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI lain, M Nasir Djamil menilai, kasus tersebut juga menjadi peringatan bagi institusi kepolisian untuk berbenah diri. Ia menilai Polri perlu memperkuat pengawasan penggunaan senjata api.

Nasir menyerukan agar pelaku diproses sekaligus dibebaskan sanksi yang tegas.

Tambang ilegal

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari, di halaman Mapolres Solok Selatan, Sumatra Barat, Jumat (22/11/2024) sekitar pukul 0.43.

Alasan Dadang menembak Ryanto karena dia tak suka Satreskrim menindak aktivitas tambang ilegal dan juga menangkap temannya pebisnis tambang ilegal galian C.

AKP Ryanto yang ditembak Dadang pun dilaporkan tewas di tempat akibat dua luka tembak di kepala.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menginstruksikan Polda

Sumbar mengusut tuntas kasus ini.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman mempertanyakan apakah Dadang ini melindungi tambang ilegal, sehingga ketika tambang tersebut ditindak Ryanto, Dadang marah. Padahal, sebenarnya yang dilakukan Ryanto adalah hal yang benar.

"Jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membekingi tambang ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak Satreskrim, orang ini marah. Ini harus diusut tuntas," kata Habiburokman.

Habiburokman juga menduga bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Sebab, pelaku membawa senjata yang kemudian digunakan untuk menembak korban. **(Humina)****